

POLITIK KELUARGA DALAM PILKADA SERENTAK

Muhtar Haboddin*

Abstract

This article raises the way in which family politics simultaneously work in concurrent local election of Indonesia. Family politics has thickened in recent times in the context of local head elections. Their presence on the local political scene is more due to having networks, connections and capital - all of which are political capital used in contestation for political office. The presence of a number of family politics in the election is legally formal, but in terms of democracy is certainly not good because it does not give chance to emerge other figures except their families. Therefore, the greatest challenge in instituting a good and strong local democracy is the way to re-arrange the process of political recruitment at the local level.

Keywords: *family politics, concurrent local election, and local democracy.*

Abstrak

Artikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kehadiran mereka dalam panggung politik lokal lebih disebabkan karena memiliki jaringan, koneksi dan capital - yang kesemua ini merupakan modal politik yang digunakan dalam kontestasi meraih jabatan politik. Kehadiran sejumlah keluarga besar dalam pilkada secara hukum formal tidak melanggar, tetapi dari segi demokrasi tentunya tidak sehat karena tidak memberikan ruang muncul figur lain selain keluarga mereka. Karena itu, tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat adalah cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal.

Kata kunci: *politik keluarga, pilkada serentak, dan demokrasi lokal.*

***Korespondensi:**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas
Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145
email: muhtar_haboddin@ub.ac.id

Pengantar

Politik dinasti hadir karena memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan aturan main dan lembaga-lembaga politik demokrasi baru yang dinilai lebih baik. Aktor ini bukan memperbaiki mutu lembaga-lembaga demokratis, melainkan memanfaatkannya guna menjamin kepentingan politik mereka.
Tempo, 10 Oktober 2004

Praktik politik kekerabatan atau politik dinastis semakin marak dan mengancam eksistensi demokrasi
Kompas, 12 Februari 2011

Dua kutipan ini saling terkait meskipun sumbernya berbeda. Baik Tempo maupun Kompas menyoroti persoalan politik kekerabatan/politik keluarga atau politik dinasti. Selama pelaksanaan pilkada serentak, wajah politik lokal berhasil disulap menjadi panggung keluarga para pejabat daerah. Dikatakan demikian, karena dalam pilkada langsung, sejumlah kepala daerah berhasil mendudukkan anggota keluarganya sebagai gubernur maupun bupati/walikota. Keberhasilan sejumlah kepala daerah dalam mendudukkan keluarganya di panggung politik lokal bisa dibaca sebagai kejelian mereka dalam menunggangi prosesi demokrasi prosedural yang sedang dirayakan.

Kemampuan memanfaatkan celah demokrasi prosedural melalui pesta politik yang bernama pilkada merupakan bukti bahwa pilkada langsung sangat ramah dengan para pejabat yang memiliki jaringan dan pemilik kapital. Dengan jabatannya—para ‘*incumbent*’/petahana berusaha menyusun strategi dalam kerangka mendudukkan keluarganya dalam panggung politik pilkada serentak. Data yang dilansir Kemendagri menyebutkan sebanyak 57 kepala daerah yang berhasil mentransfer kekuasaan: dari suami kepada istri, dan dari ayah kepada putranya (Haboddin, 2015). Keberhasilan para kepala daerah dalam mentransfer kekuasaan kepada istri, anak, adik dan ipar merupakan strategi baru dalam mempertahankan dan melestarikan kekuasaan keluarga dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Fenomena ini bisa disebut’ sebagai rezim keluarga di pilkada’ (Kompas, 2010).

Makna Politik Kekerabatan

Politik kekerabatan populer beberapa tahun terakhir. Politik kekerabatan hadir seiring dengan liberalisasi politik dan praktek politik desentralisasi. Politik kekerabatan

merupakan konsep lama dalam kajian ilmu politik. Secara sederhana Politik kekerabatan dimaknai mirip dengan dengan perilaku nepotisme. Mengapa demikian? Karena politik kekerabatan melakukan praktik pendistribusian kekuasaan diantara para anggota keluarga sedarah (Haboddin, 2015). Makna ini mengilustrasikan bahwa dalam politik kekerabatan kekuasaan didistribusikan diantara anggota keluarga. Anggota keluarga bisa istri, anak, adik, dan ipar.

Sedangkan Leo Agustino mendefinisikan politik kekerabatan hampir mirip dengan politik dinasti dalam arti politik tradisional. Leo Agustino mengartikan politik kekerabatan sebagai:

Upaya penguasa meletakkan keluarga, dan kerabat pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan membangun sebuah kerajaan politik di dalam pemerintahan, baik nasional maupun di tingkat lokal. Upaya itu dilakukan agar mereka yang menjadi anggota politik kekerabatan dapat 'saling menjaga' dan kekal dalam kekuasaan, disamping mampu mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan keluarga tersebut (Agustinus, 2010).

Poin penting dari analisis di atas adalah politik kekerabatan beroperasi dalam lingkup institusi politik dan pemerintahan dengan cara memasukkan anggota keluarga dan sanak saudara. Keluarga dan sanak saudara yang menjabat kuasa dalam politik diharapkan 'saling menjaga' agar bisa bertahan lama dalam kekuasaan. Lebih lanjut, Leo Agustino mengatakan dengan mendudukan keluarga atau saudara dalam jabatan strategis akan memudahkan penguasa mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa. Sebagai ilustrasi bagaimana kekuasaan terbangun dalam trah keluarga pejabat lokal bisa dilihat tabel 1

Tabel 1. Politik Keluarga di tingkat lokal

Nama	Kerabat	Jabatan
Hasani (wali kota Pasuruan 2010-2015)	Ismail Marzuki (anak)	Ketua DPRD Kota Pasuruan 2010-2015
Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah 2010-2015)	R Atu Narang (kakak); Aries M Narang Keponakan	Ketua DPRD Kalteng 2009-2014; anggota DPRD Kalteng 2009-2014
Syahrul Yasin Limpo (2008-2012-2012-2017)	Tenri Olleh (Adik); Adnan Puricha (ponakan)	Anggota DPRD Sulsel 2009-2014

Kompas, 12 Februari 2011

Politik berawal dari Keluarga

Keluarga sudah lama menjadi perhatian dalam kajian ilmu politik. Karya klasik Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews *Perbandingan Sistem Politik*, sudah lama menyebutkan betapa kuatnya pengaruh keluarga dalam pembentukan politik seseorang. Dalam pandangan kedua penulis tersebut:

Keluarga memiliki pengaruh kuat dan kekal dalam struktur sosialisasi politik. Keluargalah yang membentuk sikap politik seseorang, memberikan kecakapan dalam interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dalam politik (Mas'ood dan MacAndrews, 1995).

Poin penting dari kutipan di atas adalah menempatkan keluarga sebagai poros sentral dalam sosialisasi politik, pembentukan sikap politik, menambah kecakapan politik serta bisa mendorong anggota keluarganya dalam berpartisipasi dalam politik. Kalau demikian argumennya, maka keluarga merupakan institusi pembentukan pendidikan politik dan pembentukan karakter serta sikap politik. Sebagai ilustrasi, marilah kita simak pengakuan Megawati Sukarno Putri sebagaimana ditulis Akhmad Bahar. Menurut pengakuan Megawati:

Terus terang saya belajar dari bapak, Bung Karno. Terutama wawasan politik dan kebangsaan. Ya, bagaimanapun dalam kehidupan saya ini sudah terjadi asahan dari naluri politik yang sudah ada. Mega ingin mengatakan bahwa bahwa ia belajar politik dari Bung Karno sejak anak-anak? Betul, sebab saya mengikuti Bung Karno bukan hanya sebagai presiden sebagai pemimpin bangsa (Bahar, 1996).

Pengakuan Mega memberikan sedikit informasi bahwa keluarga merupakan pembentukan politik pertama sebelum berkiprah di dunia luar. Pengalaman politik Mega, ternyata bisa ditemukan pula dalam diri mantan presiden Amerika Serikat, George W Bush yang menuturkan kisahnya.

Banyak orang mulai terjun ke dunia politik sebagai aktivis mahasiswa, sebagai anggota gerakan pemuda, atau sebagai manusia paruh-baya yang peduli dengan masyarakatnya. Hanya sedikit yang seperti saya, terlahir dengan darah politik. Ayah dan ibu saya adalah politisi tangguh. Dan, saya telah terlibat dalam politik sejak kecil (McClellan, 2009).

Tiga kutipan di atas sengaja ditampilkan dalam kerangka memahami bahwa keluarga memiliki andil yang cukup besar dalam pembentukan politik seseorang. Keluarga adalah dapur politik dalam penggodokan kader politik selanjutnya—yang diharapkan dapat melanjutkan karir politik sang ayah dalam pentas politik. Studi yang

dilakukan Leo Agustino di Banten dalam batas tertentu berhasil menelisik eksistensi keluarga Atut Chosiyah dalam pentas politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional (Agustino, 2010) Studi lainnya yang patut dipertimbangkan adalah Wasito Raharjo Djati yang menyebutkan pada level tertentu, familisme kemudian mengorganisasikan diri menjadi dinasti politik untuk menjaga kelanggengan kuasa dan mengontrol sepenuhnya suara masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Djati, 2013).

Tiga Basis Material

Pilkada secara langsung merupakan kompetisi bebas antar-kontestan. Kontestan yang ikut dalam pilkada serentak terdiri dari pasangan calon yang diusung partai politik dan calon perseorangan/independen. Dua entitas inilah, yang sama-sama bertarung dalam memperebutkan kepala daerah. Data yang dilansir *Kompas* menyebutkan bahwa pada pilkada serentak 2015 sebanyak 827 pasangan calon yang ikut bertarung. Sebanyak 690 pasangan calon yang diusung partai politik dan sisanya yakni 137 pasangan calon perseorangan/independen (Kompas, 2016).

Dari data ini kita bisa melihat bahwa semangat masyarakat untuk menjadi pejabat kepala daerah sangat besar. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pasangan calon yang maju dalam pilkada langsung perlu memiliki tiga basis material. *Pertama*, memiliki investasi politik masa lalu yang dimanifestasikan dalam bentuk kinerja pemerintahan yang baik selama berkuasa (Haboddin, 2015). Melalui kinerja pemerintahan yang baik, keluarga petahana bisa diterima oleh masyarakat pemilih. Inilah salah satu modal kekuatan dari keluarga petahana bila dibandingkan dengan pasangan calon yang baru pertama kali terlibat dalam pilkada langsung. Modal investasi politik dari suami atau ayah dijadikan senjata dalam pilkada. Karena itu, kita sering mendapatkan slogan dalam kampanye politik pilkada yang bertuliskan: pilih yang sudah terbukti atau lanjutkan program yang sudah berhasil.

Kedua, jaringan kekuasaan, baik formal maupun non-formal sudah dikuasai. Penguasaan jaringan formal seperti partai politik maupun birokrasi sangat diperlukan dalam usaha mensolidkan kekuatan di daerah. Dalam konteks kepala daerah *incumbent*

Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak komunikasi politik antar partai politik biasanya sudah berjalan dengan baik. Karena itu, ketika mereka maju pada pemilihan yang kedua semua partai politik dirangkul dalam koalisi besar.

Kepala daerah bisa melakukan semua itu agar mengurangi jumlah pasangan calon dalam pilkada serentak. Sebagai ilustrasi, pasangan petahana Rendra Kirsna di kabupaten Malang membangun koalisi besar pada pilkada 2015. Selain merangkul sejumlah pengurus partai politik, pasangan *incumbent* juga biasa melakukan mobilisasi birokrasi daerah dalam pilkada. Data yang dilansir Bawaslu menyebutkan bahwa sebanyak 67 laporan keterlibatan birokrasi dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2015. Adapun rinciannya bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Keterlibatan Birokrasi Daerah dalam Pilkada

No	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Timur	1
2	Jawa Tengah	8
3	Sumatra Barat	1
4	Sulawesi Selatan	12
5	Kepulauan Riau	1
6	Lampung	6
7	DIY	7
8	Maluku Utara	10
9	Sulawesi Utara	1
10	Sumatra Utara	4
11	Banten	2
12	Sulawesi Tenggara	6
13	Kalimantan Utara	1
14	Kalimantan Selatan	1
15	Kalimantan Tengah	1
16	Bali	1
17	Kalimantan Barat	1
18	Nusa Tenggara Timur	1
19	Jambi	1
Jumlah		66

Muhammad, *Rapat Dengar Pendapat Bawaslu dengan DPR*, pada tanggal 1 Februari 2016, hlm. 26

Data di atas menunjukkan kemampuan *incumbent* dalam melakukan mobilisasi birokrasi daerah pada pilkada serentak. Dari sembilanbelas provinsi yang ‘merayakan’ pilkada serentak sebanyak 66 kasus yang tercatat melalui lembaga Bawaslu. Provinsi yang paling banyak melakukan mobilisasi birokrasi daerah adalah Sulawesi Selatan (12

kasus) dan Maluku Utara sebanyak 10 kasus. Sedangkan Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah masing-masing 1 kasus laporan.

Selain memobilisasi birokrasi daerah, para *incumbent*/petahana juga berusaha mengkooptasi lembaga masyarakat sipil yang ada di daerah masing-masing. Cara biasa yang dilakukan para *incumbent*/petahana untuk menundukkan penggiat LSM adalah dengan memberikan dana bantuan sosial serta menjadikan mereka sebagai tim sukses dalam pilkada. Tujuannya hanya satu yakni menjadikan LSM sebagai sarana mengumpul suara.

Ketiga, kekayaan sebagai kekuatan dalam usaha membeli partai politik maupun suara pemilih. Dalam bahasa Mohtar Mas'ood ketika perolehan suara itu bisa efektif dengan uang, maka hanya orang kaya mempunyai peluang dan mendominasi politik lokal (Kompas, 2006). Penjelasan Mas'ood tentu ada benarnya. Dalam pilkada langsung uang sangat diperlukan dalam membiayai proses politik. Mulai membayar uang mahar partai, membiaya kampanye, beriklan tv dan koran, membiayai lembaga survei sekaligus konsultan politik, membiayai parak saksi di TPS hingga memberikan uang kepada pemilih (Haboddin dan Syahdan, 2009).

Dalamnya keterlibatan uang dalam pilkada menunjukkan bahwa hanya orang kaya dan memiliki kapital besar yang bisa berlaga. Karena itu, dalam pilkada langsung keterlibatan para *incumbent* yang kaya dan pengusaha selalu hadir dalam pentas politik lokal. Dalam bahasa Daniel Dhakidae dalam demokrasi elektoral justru memperkuat kehadiran politisi kaya dan hartawan (Dhakidae, 2014) dalam politik lokal.

Tiga basis material tersebut saling terkait dalam usaha memburu dan mempertahankan kekuasaan politik. Kemampuan para keluarga petahana dalam mengoperasionalkan tiga basis material secara simultan memudahkan gerak langkah sang istri ataupun anak mereka untuk memperoleh jabatan kepala daerah. Tidak hanya itu, pemanfaatan struktur kesempatan melalui pemilihan langsung kepala daerah ikut mendorong semakin menguatnya politik kekerabatan dalam panggung politik lokal.

Keluarga *Incumbent* dalam lingkaran Pilkada Serentak

Tiga basis material di atas sangat diperlukan bagi *incumbent*/petahana dan keluarga dalam pilkada serentak. Investasi politik, jaringan, dan kekayaan merupakan kaharusan yang sejatinya dimiliki oleh pasangan calon. Fondasi material diperlukan dalam kerangka memperoleh kuasa dalam pilkada. Bahkan, dalam pilkada langsung, penguatan kekerabatan atau biasa disebut politik dinasti hadir dan mengental dalam peta politik lokal. Untuk membuktikan kehadiran politik kekerabatan dalam pilkada bisa dibaca pada tabel 3.

Tabel 3. Keluarga *incumbent* di Bursa pilkada

Nama	Hub keluarga	Provinsi/Kab	Keterangan
Haryanti Sutrisno	Sutrisno (suami)	Kab Kediri	Golkar,PDIP,PPP, PKNU
Ony Anwar Harsono	Harsono (Anak)	Kab Ngawi	PDIP,GOLKAR,PKS,PAN
Sri Surya Widati	Idham Samawi (suami)	Kab Bantul	PAN,GOLKAR,PKPB
Anna Sophana	Irianto (suami)	Kab Indramayu	GOLKAR
Daniel Mutaqiem	Irianto (ayah)	Kab Indramayu	GOLKAR
Aida Zulaikha	Isme Abdullah (suami)	Kepri Riau	GOLKAR,PPP,PKB,PPR N, PELOPOR,PDS,
Adlina T Milwan	T Milwan (suami)	Kab Labuhanbatu	GOLKAR,DEMOKRAT, PDIP,PAN,PBR,PBB
Ruwaida Mile	Ismet Mele (suami)	Bone Bolango	PKNU
Titik Suprapti	Bambang Riyanto (suami)	Kab Sukoharjo	PDIP,GOLKAR,PBB
Martiani Setyaningtyas	Sujud Pribadi (suami)	Kab Malang	Perseorangan
Emi Susanti	Win Hendarso (suami)	Kota Surabaya	PAN
Sumiyati	Mochtar Mohammad	Kota Bekasi	Tidak ada data

'Rezim Keluarga di Pilkada', *Kompas*, 19 April 2010; lihat juga 'Istri yang Tergoda Kuasa', *Kompas*, 5 Maret 2010

Tabel 3. menunjukkan betapa 'bernafsunya' keluarga *incumbent* untuk ikut bagian dalam politik pilkada serentak. Data yang berhasil dihimpun mengilustrasikan bahwa istri dan anak merupakan pilihan paling tepat bagi *incumbent* dalam melestarikan kekuasaannya. Jalur politik kekerabatan yang diturunkan sang ayah ke samping (istri)

dan ke bawah (anak) merupakan strategi politik dalam kajian sosiologi disebut *gemeinschaft by blood* yakni mengaju pada ikatan-ikatan kekerabatan (Sunarto, 2015).

Politik kekerabatan tumbuh dan berkembang secara ‘liar’ dan ‘brutal’ dalam demokrasi elektoral. Dikatakan ‘liar’ dan ‘brutal’ karena untuk kandidat yang diajukan sebagai pengganti suami biasanya tidak memiliki pengalaman memimpin dan minus kapasitas intelektual. Mereka yang diajukan dalam bursa pilkada adalah generasi penyusu atau penumpang yang berlindung pada kewibawaan dan popularitas orangtua atau keluarga dekatnya, sementara dia sendiri secara politik masih belum punya apa-apa yang bisa ditawarkan kepada bangsa dan negara (Maarif, 2009)

Implikasinya adalah kita sering mendengar kepala daerah yang di bawah bayang-bayang suami ataupun ayahnya. Kepala daerah boneka. Meskipun suara sumbang seringkali muncul di media massa, namun fakta lapangan menunjukkan lain, yakni keluarga *incumbent* terus saja hadir dan terpilih dalam pilkada. Data yang berhasil penulis peroleh sejak pilkada 2012 hingga 2015 terekam pada tabel 4.

Tabel 4. mengilustrasikan keterpilihan sejumlah keluarga *incumbent* pada pilkada langsung periode 2012 hingga 2015. Dari data yang ditampilkan kebanyakan terpilih menjadi kepala daerah adalah para istri bupati, yakni di Kab Sragen, kab Kendal, Kab Indramayu, Kota Cimahi dan Kab Probolinggo. Kehadiran para istri bupati dalam jabatan kepala daerah mengilustrasikan bahwa di era egalitarian ini, nama besar suami masih laku dijual untuk mendapatkan jabatan politik kepala daerah (Kompas, 2013).

Selain itu, tabel 4 juga memuat sejumlah anak *incumbent* berhasil menggantikan ayahnya sebagai kepala daerah. Sebagai contoh wakil walikota Mataram, Rita Widyasari menggantikan Syaukani di Kab Kutai Kertanegara, Zumi Zola terpilih menjadi gubernur Jambi menggantikan ayahnya serta Ivan Sarundjang sebagai wakil walikota di Kab Minahasa, serta Adnan Purita terpilih sebagai bupati menggantikan ayahnya Ichsan Yasin Limpo. Yang tidak kalah pentingnya adalah melalui pilkada langsung kerabat *incumbent* juga terpilih, yakni Airin adik ipar Ratu Atut dan Iksan Iskandar sebagai sepupu mantan Radjamili di kab Jenepono.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka argumen yang disampaikan Wasito Raharjo Djati bisa menjadi penguat analisis. Wasito Raharjo Djati mengatakan:

Pemilihan kepala daerah memiliki tren untuk mewariskan kekuasaannya kepada kerabat demi menjaga kekuasaan dan menutupi aib politik. Semua itu mengkondisikan terbentuknya dinasti politik di ranah lokal. Dinasti politik mengandalkan kekuatan personal, klientelisme, dan relasi patrimonial yang menempatkan elit di atas masyarakat (Djati, 2013)

Tabel 4. Keluarga petahana terpilih pada pilkada 2012-2015

Nama	Hub keluarga	Provinsi/Kab	Tahun
Puput Triana	Hasan A (Suami)	Kab Probolinggo	2012
Makmun Ibnu F	Fuad Amin (ayah)	Kab Bangkalan	2012
Iksan Iskandar	Rajamilo (sepupu)	Kab Jeneponto	2012
Atty Suharty	Itoch Tochija (suami)	Kota Cimahi	2012
Ivan Sarundjang	Sinyo Sarundjang (ayah)	Kab Minahasa	2014
Hariyanti	Sutrisno (suami)	Kab Kediri	2015
Adnan Purita	Ichsan YL (ayah)	Kab Gowa	2015
Rita Widyasari	Syaukani (ayah)	Kutai Kertanegara	2015
Anna Sophana	Irianto (suami)	Kab Indramayu	2015
Zumi Zola	Zulkifli Nurdin (Ayah)	Prov Jambi	2015
Airin Racmi D	Ratu Atut (Ipar)	Tangeran Selatan	2015
Ni Putu Eka W	N Adi Wiryatama (suami)	Kab Tabanan	2015
Widya Kandi S	Hendy Bandoro (suami)	Kab Kendal	2015
Kusdinar Untung	Untung (suami)	Kab Sragen	2015
Ratu Tatu Khazanah	Ratu Atut Chosiyah (adik)	Bupati Serang	2015
Mohan Roliskana	M Ruslan (Ayah)	Wakil Walikota Mataram)	2015

Diolah dari Muhtar Haboddin, *Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia*, Malang, UB Pres, 2015, Husni Kamil Manik *Pokok-pokok Penjesalan KPU pada acara Dengar pendapat dengan DPR*, pada tanggal 1 Februari 2016

Pilkada Sebagai Ajang Melestarikan Kekuasaan

Kehadiran sejumlah nama besar keluarga dalam panggung politik lokal semakin membuktikan keabsahan pepatah lama yang mengatakan bahwa *darah lebih kental daripada air*. Pepatah ini sangat relevan dalam memotret cara kerja politik kekerabatan dalam memburu dan mempertahankan kekuasaan melalui pilkada langsung. Sebagai ilustrasi keluarga Yasin Limpo di Sulawesi Selatan sudah berhasil menancapkan kekuasaannya di Kab Gowa. Dalam catatan penulis menunjukkan bahwa Kab Gowa

sudah berhasil diperintah selama tiga generasi. Generasi pertama yang berhasil menjadi bupati adalah Yasin Limpo, kemudian dilanjutkan dua anaknya secara berturut-turut yakni Syahrul Yasin Limpo dan Ichsan Yasin Limpo (Haboddin, 2015).

Syahrul sekarang menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan sedangkan Ichsan baru saja lengser sebagai bupati Gowa. Menurut kabar yang beredar akan maju menggantikan kakaknya, Syahrul sebagai gubernur pada pilkada 2017. Setelah sang ayah mundur dari kursi bupati karena sudah dua periode menjabat, kini giliran anaknya, Adnan Purita menjadi bupati Gowa. Adnan Purita terpilih sebagai bupati melalui jalur perseorangan/independen pada pilkada serentak 2015.

Kasus Gowa mirip dengan keluarga TB Chasan Sohib di Banten. Banten yang merupakan wilayah pamekaran dari Jawa Barat, berlahan-lahan berubah menjadi daerah kekuasaan keluarga TB Chasan Sohib. Harian *Kompas* menurunkan judul berita: *Jejaring Kekuasaan Saudara Sedarah*. Pada alinea kedua tulisan ini menyebutkan;

Otonomi daerah, tidak bisa diingkari, melahirkan patron baru dalam perpolitikan lokal. Politik kekerabatan pun kian kental terlihat, tak terkecuali di Banten. Hampir semua akses politik, ekonomi, dan kemasyarakatan dikuasai kelompok tertentu yang terikat hubungan darah dan kesekatan personal. Sudah menjadi rahasia umum jika keluarga gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menguasai sejumlah jabatan strategis dalam politik dan pemerintahan di Banten. Mereka juga terlibat dalam berbagai jabatan informal (Kompas, 2010).

Pada bagian lain disebutkan:

Budaya politik kekerabatan diterapkan dengan baik oleh keluarga Atut. Bupati dan walikota di provinsi ini berusaha melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan sejumlah kerabat dalam jabatan politik dan pemerintahan. misalnya, Adik Ipar Atut yakni Airin Rachmi Diany sudah dua kali terpilih sebagai wali kota Tangerang Selatan. TB Haerul Jaman terpilih sebagai wakil walikota Serang, Ratu Tatu Chasanah yang pernah menjadi anggota PDRD provinsi (Kompas, 2010), kini terpilih sebagai bupati Serang pada tahun 2015.

Apa yang dipraktekkan keluarga Yasin Limpo dan TB Chasan Sohib merupakan potret diri dari kemampuan mereka menaklukkan dan merawat kekuasaan di tingkat lokal. Dua keluarga ini dalam batas tertentu berhasil menciptakan raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Baik keluarga Yasin Limpo maupun TB Chasan Sohib tergolong sangat lihai dalam menaklukkan kekuasaan tingkat lokal. Hasrat berkuasa kedua keluarga ini benar-benar teruji dan tercapai ketika bangsa ini berada dalam perayaan demokrasi prosedural yang bernama pilkada.

Pencapaian kedua keluarga ini dalam meraih kuasa telah menaikkan status sosialnya dalam peta politik lokal. Jabatan yang mereka buru dan peroleh melalui kepala daerah bukan sekedar sebagai proses aktualisasi diri sebagaimana dikatakan ahli psikolog, Abraham Maslow, tetapi jabatan merupakan sumber kuasa. Bahkan, kekuasaan bisa mendatangkan kekayaan yang berlipat-ganda serta bisa menjalin relasi dengan banyak pihak dalam konteks memperkuat posisi politik di tingkat lokal.

Apa yang harus dilakukan.

Mengentalnya politik kekerabatan di tingkat lokal merupakan buah dari pelaksanaan demokrasi prosedural. Dalam demokrasi prosedural diandaikan bahwa semua masyarakat bisa mengakses kekuasaan dan pemerintahan secara bebas, fair, dan demokratis. Mengandaian ini dalam batas minimal sudah tercapai. Maksudnya semua golongan dan semua profesi memiliki kesetaraan dalam mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bahkan, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam bursa kepala daerah melalui dua jalur: jalur partai politik atau gabungan partai politik dan jalur peseorangan/independen.

Meskipun MK sudah melegalkan dua jalur pencalonan dalam pilkada langsung, namun MK tidak bisa memprediksikan bahwa pilkada langsung akan menyuburkan politik kekeluargaan dan politik dinasti. Mengentalnya politik kekeluargaan dalam pilkada langsung akan membahayakan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Karena itu, perlu dicarikan jalan keluarnya agar demokrasi lokal bisa tumbuh dan berkembang. *Pertama*, memperkuat peran partai politik melalui sistem kaderisasi yang melembaga. Partai politik diharuskan bisa mencetak politisi/kepala daerah yang berkualitas tinggi. Politisi/kepala daerah yang dihasilkan melalui proses karir berjenjang dan terukur akan memiliki kapasitas politik yang lebih baik dibandingkan kader-kader yang diorbitkan secara instan.

Kedua, demokratisasi internal partai politik, yakni sejauhmana partai politik menciptakan prosedural internal yang demokratis dan memperhatikan faktor meritokrasi dalam seleksi internal kandidat yang akan menduduki jabatan eksekutif. Adanya

kesempatan yang sama bagi setiap kader untuk mengembangkan karir politik akan memberikan insentif bagi kelancaran sirkulasi elit di tubuh partai politik (Sugiarto, 2007) .

Ketiga, pilkada diharapkan bisa mendorong demokrasi substansial. Demokrasi substansial menjamin adanya kontrol popular terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak warga negara. Kapasitas popular dalam menkontrol pengaturan prosedural untuk berkuasa (Paskarina dkk, 2015) menjadi keharusan dalam sistem politik demokrasi bukan transformasi.

Tiga hal ini secara minimal yang bisa dilakukan dalam mengimbangi laju politik kekerabatan di tingkat lokal. Memperkuat sistem kaderisasi partai politik dan pada saat yang sama menjunjung tinggi meritokrasi dalam pengisian jabatan kepala daerah secara otonomis mempersempit ruang gerak para kandidat penyusu untuk ambil bagian dalam suksesi kepemimpinan di tingkat lokal. Pararel dengan itu, masyarakat juga diharapkan bisa melakukan kontrol terhadap prosedural pemilihan kepala daerah secara ketat. Mengurangi calon kepala daerah yang minus kapasitas dan hanya mengandalkan nama besar keluarga—tetapi memperbesar jumlah kepala daerah yang mau bekerja untuk rakyat dan selalu mempromosikan politik kesejahteraan daerah.

Catatan Kritis

Bertitik-tolak pada fakta di atas, tulisan ini sudah berusaha membongkar cara kerja politik kekerabatan dalam praktek demokrasi prosedural lewat pilkada langsung. Bahkan, melalui pilkada secara langsung kehadiran politik kekerabatan semakin mengental, bertumbuh dan berkembang seiring dengan demokrasi prosedural. Karena itu, melalui pilkada langsung, politik kekerabatan dan politik dinasti akan semakin kokoh dan terlestarikan dengan baik di beberapa kelompok keluarga besar.

Pilkada langsung dimanfaatkan dengan baik bagi sekelompok kecil keluarga yang memiliki basis material, yakni memiliki investasi politik masa lalu, jaringan yang luas dan kekayaan. Tiga modalitas ini sangat berperan dalam setiap perebutan kursi kepala daerah. Kehadiran keluarga besar Yasin Limpo di Gowa dan TB Chasan Sohib

Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak di Banten merupakan bukti kemampuan mereka dalam berkompetisi dan membajak demokrasi lokal. Dua keluarga besar ini dalam batas tertentu mampu mengorganisir diri dalam kerangka menyalurkan ambisi politiknya dalam konteks melestarikan kuasanya di tingkat lokal.

Sebagai kata penutup, penulis ingin menutup makalah ini dengan meminjam kalimat wartawan senior Harian *Kompas*, Budiarto Shambazy: suka atau tidak, fenomena politik kekeluargaan atau politik dinasti akan selalu muncul karena tidak mengenal batas kultur, sistem politik, maupun wilayah politik (Haboddin, 2015). Analisis ini merupakan ancaman sangat serius dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal***.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2010). 'Dinasti Politik Pasca Otonomi Daerah Orde Baru: Pengalaman Banten', PRISMA, Vol 29, Juli
- Arya Sugiarto, Bima. (2007). 'Problem Representasi dan Reformasi Sistem Kepartaian di Indonesia', Makalah dipresentasikan pada Pertemuan Konsultatif 'Membangun Model Keterwakilan Politik yang Demokratis di Indonesia, di Hotel Melia Purosani, Jogjakarta, 7 Desember
- Bahar, Akhmad. (1996). *Biografi Politik Megawati*, Jogjakarta, Pena Cendekia
- Dhakidae, Daniel . (2014). 'Demokrasi, Harta, dan Negara', PRISMA, Vol. 33, No.1
- Haboddin, Muhtar. (2015). *Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia*, Malang, UB Pres
- Haboddin, Muhtar. dan Gregorius Syahdan, (2009). *Evaluasi Pilkada di Indonesia*, Jogjakarta. IPD-KAS.
- Mas'oed, Mohtar dan Collin MacAndrews. (1995). *Perbandingan Sistem Politik*, Jogjakarta, UGM Press
- McClellan, Scott. (2009). *Kebohongan di Gedung Putih*, Jakarta, Gramedia
- Paskarina, Caroline. Mariatul Asiah, dan Otto Gusti Madung, (2015). *Berebut Kontrol atas Kesejahteraan*, Jogjakarta, Polgov
- Raharjo Djati, Wasito. (2013). 'Revivalisme Kekuatan *Familisme* dalam Demokrasi' Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 18. No.2 Juli
- Sunarto, Kamanto .(1993). *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, FEUI Press.